

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1	Ajeng Rizka Riadiani, Agus Wahyudin (2015) (Riadiani dan Wahyudin, 2015)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Financial Distress Sebagai Intervening	- kepemilikan institusional secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba - kepemilikan manajerial secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba - dewan komisaris independen secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
2	Wieta Chairunesia, Putri Renalita Sutra, Sely Megawati Wahyudi 2018	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Indonesia Yang Masuk Dalam Asean Corporate Governance Scorecard	Hasil uji t variabel secara parsial Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Sedangkan Financial

	(Chairunesia <i>et al.</i> , 2018)		Distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.
3	Riski Saraswati, 2016 (Saraswati <i>et al.</i> , 2016)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)	<p>-Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini terjadi karena adanya dewan komisaris tidak menutup kemungkinan pihak manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba.</p> <p>-Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, keberadaan komite audit hanya dijadikan untuk terpenuhinya syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga komite audit yang dimiliki kurang mampu bekerja secara independen dalam melakukan pemeriksaan</p>

			<p>terhadap laporan keuangan perusahaan</p> <p>-Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Tinggi rendahnya kepemilikan saham oleh institusi tidak memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba.</p> <p>-Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Besarnya kepemilikan manajerial belum tentu mampu mengurangi praktik manajemen laba, hal ini karena tingginya tingkat manajemen laba dengan pola income increasing adalah bonus purpose.</p> <p>-Financial distress berpengaruh terhadap manajemen laba, financial distress merupakan suatu</p>
--	--	--	---

			kondisi dimana perusahaan sedang berada dalam keadaan kesulitan pendanaan, maka dirasa perlu jika manajemen melakukan manajemen laba pada saat perusahaan sedang mengalami kondisi financial distress
4	Sucipto dan Zulfa (2020) (Sucipto dan Zulfa, 2021)	Pengaruh Good Corporate Governance, Financial Distress, dan Ukuran perusahaan terhadap Manajemen Laba	Tidak berpengaruhnya Pengaruh Good Corporate Governance, Financial Distress, dan Ukuran perusahaan terhadap Manajemen Laba perusahaan sektor farmasi pada tahun 2015-2019

B. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi

Teori agensi atau teori agensi menggambarkan pemisahan antara fungsi manajemen (oleh manajer) dengan fungsi properti (oleh pemegang saham) di sebuah perusahaan (Triyuwono, 2018). Hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk menyediakan layanan, maka delegasikan Otoritas pembuat keputusan kepada agen. Tujuan manajer dan pemegang saham

adalah sama, yaitu tingkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham. Tetapi, sering manajer tidak melakukannya bertindak selalu untuk pemegang saham atau mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan pemegang saham sehingga konflik antara kepala perusahaan dan pemegang sahamnya.

Teori agensi menunjukkan bahwa praktik pengelolaan pendapatan dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agen dan direktur yang timbul dari ketika masing-masing pihak mencoba untuk mencapai atau memelihara tingkat kemakmuran yang diinginkannya (Maharani dan Juliarto, 2019). Pada dasarnya, teori agensi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara modal (pemilik) dan agen (manajemen). Pemilik atau pemegang saham mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen perusahaan. Manajemen Perusahaan yang dilakukan oleh manajemen telah diberi tahu tentang pemilik (utama) dalam bentuk laporan keuangan. Dengan sistem desentralisasi seperti ini, dapat dilihat bahwa manajemen memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan pemilik perusahaan, karena manajemen telah menerima delegasi dari pemilik masyarakat dan pemilik . Oleh karena itu manajemen dapat menentukan kebijakan yang diuntungkan sebelum memberikan manfaat kepada pemilik atau pemegang saham.

Konflik kepentingan dalam hubungan keagenan (Wirahadi Ahmad *et al.*, 2008) . Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingan terhadap perusahaan. Sebagai

agen, manajer bertanggungjawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun demikian manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendak. Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.

2. Asimetri Informasi

Asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (earnings management) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham) (Luayyi, 2010). Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (agency cost). Agency cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya residual loss.

Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan prinsipal akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut residual loss. Menurut (Scott, 2015) berpendapat bahwa asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana satu pihak tidak memiliki

pengetahuan tentang pihak lain yang terlibat dalam suatu transaksi sehingga tidak memungkinkan membuat keputusan yang akurat dimana salah satu pihak terlibat memiliki keunggulan dalam memiliki akses dan pengetahuan akan informasi dibandingkan dengan pihak lainnya dari pada principal.

3. Good Corporate Governance

Governance berasal dari bahasa Prancis “Gubernance” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut digunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi corporate governance. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (stakeholders) demi tercapainya tujuan organisasi (Aldridge dan Sutojo, 2008). Dalam arti sempit, hubungan yang dimaksud adalah antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan dalam arti luas termasuk hubungan dengan pemerintah, kreditur, pelanggan, kelompok lain dan masyarakat (Riadiani dan Wahyudin, 2015).

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam penelitian (Budiarti, 2011) membagi asas corporate governance menjadi lima yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness. Asas ini lebih dikenal dengan singkatan TARIF. Berikut ini penjelasan dari asas-asas dalam corporate governance menurut KNKG (2006):

- a. Transparansi (Transparency) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- b. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
 - c. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
 - d. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
 - e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
4. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut (Saraswati *et al.*, 2016) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:13). Peranan dan keberadaan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris selaku supervisory board pada struktur organisasi menjadi sangat vital dalam memilah dan mengawasi setiap kebijakan yang akan diambil oleh Direksi selaku executive board. Sebagai komisaris independen, mereka memiliki fungsi dan kedudukan mewakili kepentingan pemegang saham independen.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas perseroan, mereka juga harus terlibat, memeriksa memutuskan dan mengambil tindakan yang menyangkut kepatuhan, tanggung jawab hukum direksi atas setiap keputusan, informasi dan perilaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan usaha perseroan (Dwi dan Eka, 2008:89) dalam penelitian (Fathonah, 2017). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. (Boediono, 2005) menggunakan indikator dalam mengukur komposisi dewan komisaris adalah persentase jumlah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan, dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

5. Komite audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari

corporate governance di perusahaan-perusahaan. Collier dan Gregory dalam Harahap (2001) menjelaskan bahwa komite audit memberikan manfaat bagi peningkatan sistem pengawasan dan juga pada GCG. Fathonah (2017) mengungkapkan bahwa fungsi komite audit secara spesifik dapat diidentifikasi ke dalam tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, auditor dan pengauditan, serta organisasi perusahaan (Dwi dan Eka, 2008:87).

Bapepam melalui Surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit (Widyati, 2013). Pada penelitian ini, komite audit diukur dengan kompetensi komite audit yaitu jumlah anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan terhadap keseluruhan jumlah anggota komite audit Atmini dan Prihatiningtias (2008) dalam (Ginting, 2012).

6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Hal ini berkaitan dengan rasa memiliki yang tinggi terhadap saham tersebut sehingga diharapkan dapat mengurangi financial distress atau kesulitan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emrinaldi (2007) dalam (Hastuti, 2014)

menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial yang semakin besar akan mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan tersebut. Menurut hal ini dapat terjadi karena semakin besar kepemilikan manajerial akan mampu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya financial distress. Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham yang beredar (Saraswati *et al.*, 2016).

7. Kepemilikan Instusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi Beiner *et al* (2003) dalam (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen, sehingga dengan kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalkan. Pernyataan ini sejalan dengan (Putri dan Nasir, 2006) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan hal ini dapat mengurangi biaya keagenan. Nilai perusahaan juga akan meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. Dwi dan Eka (2008:90) menjelaskan juga bahwa kepemilikan saham institusional adalah saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan.

Dengan adanya institusional ownership, monitoring atas perusahaan akan meningkat. Hal ini diakibatkan karena institusi lain yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan memonitor lebih ketat, yang didukung oleh information channel yang lebih baik dibandingkan kepemilikan saham oleh individu. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. (Saraswati *et al.*, 2016)

8. Financial Distress

Financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Altman, 2013). Financial distress dapat digambarkan dari dua titik ekstrim yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang menjadi parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. Financial distress terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan perusahaannya yang bermula dari kegagalan dalam mempromosikan produk yang dibuatnya yang menyebabkan turunnya penjualan sehingga dengan pendapatan yang menurun dari sedikitnya penjualan memungkinkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan. Lebih lanjut, dari kerugian yang terjadi akan mengakibatkan defisiensi modal dikarenakan penurunan nilai saldo laba yang terpakai untuk melakukan

pembayaran dividen, sehingga total ekuitas secara keseluruhan pun akan mengalami defisiensi. Jika hal ini terus terjadi, maka tidak mustahil bahwa suatu saat total kewajiban perusahaan akan melebihi total aktiva yang dimilikinya. Kondisi seperti yang telah disebutkan di atas mengasosiasikan suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang pada akhirnya jika perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi tersebut di atas, maka perusahaan tersebut akan mengalami kepailitan (Saraswati *et al.*, 2016).

9. Manajemen Laba

(Setiawati *et al.*, 2000) mendefinisikan manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakaian laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, 1989). Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa *earnings management* terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk Anak Agung Mas Ratih Astari dan I Ketut Suryanawa. Faktor...
293 menyesatkan para pengguna laporan keuangan tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan (Astari dan Suryanawa, 2017).

Menurut DWI A (2015) ada berbagai faktor yang mendorong pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba, namun secara umum menurut Scoot (2009:411) mengelompokkan menjadi enam alasan, yakni sebagai berikut:

- a. Bonus Purposes. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini. Hal ini disebabkan karena dasar perhitungan bonus yang akan diterima oleh manajemen adalah tingginya laba akuntansi.
- b. Political motivations. Manajemen laba yang digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
- c. Taxations motivations. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi yang digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan perusahaan.
- d. Pergantian CEO. CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk menaikkan bonus. Dan jika kinerja perusahaan buruk, akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
- e. Initial Public Offering. Perusahaan yang go publik belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go publik melakukan manajemen laba dalam prospectus dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.
- f. Pentingnya memberi informasi pada investor. Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja baik.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Darmawati (2003) mengemukakan bahwa perusahaan yang memanipulasi pendapatan lebih cenderung memiliki dewan direksi yang dipimpin manajemen dan lebih cenderung memiliki CEO yang juga menjabat sebagai ketua. Sementara itu, (Darmawati, 2003) menemukan bahwa perusahaan yang tidak melakukan kecurangan memiliki dewan direksi, dan proporsi anggota eksternal lebih tinggi daripada perusahaan yang curang. Hasilnya juga menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengalaman dan keahlian dewan, kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan juga akan berkurang. Terkait independensi, komisaris eksternal yang menjadi komisaris perusahaan biasanya memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Hal tersebut akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen, karena pengawasan yang dilakukan oleh komisaris lebih baik dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dalam perusahaan (Marrakchi Chtourou *et al.*, 2001). Begitu pula dengan independensi dewan pengawas yang berhubungan negatif dengan tingkat manajemen pendapatan, dengan kata lain, semakin independen dewan pengawas, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian (Marrakchi Chtourou *et al.*, 2001) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris eksternal maka semakin kecil pula manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. (Kusumaning, 2004) meneliti pengaruh proporsi komisaris eksternal terhadap aktivitas manajemen laba. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan pengurus eksternal terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

(Beasley, 1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan (outsider director) juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007).

H₁ : Proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh (Nasution dan Setiawan, 2007) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan.

Veronica dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Penelitian oleh (Veronica and Bachtiar, 2004) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan yang signifikan dengan akrual kelolaan perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya untuk periode 2001- 2002, artinya kehadiran komite audit secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut. (Veronica and Bachtiar, 2004) juga meneliti pengaruh interaksi dari persentase komite audit dengan akrual diskresioner, dan hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan adanya koefisien positif yang signifikan dalam hubungan antara reaksi pasar dan interaksi antara komite audit dan akrual diskresioner. Hal ini membuktikan bahwa pasar menilai positif akrual kelolaan perusahaan yang memiliki komite audit yang diindikasikan dengan tingginya return perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Hasil penelitian ini dan DeFond dan Jiambalvo (1991) menunjukkan bahwa perusahaan yang salah Kantor akuntan tidak mungkin memiliki komite audit. Persyaratan pembentukan komite perusahaan Sejak audit 2001, komite audit Perbandingan proporsi komite audit independen dengan atau tanpa komite audit Jumlah total anggota komite audit. Chtorou, Bedard dan Chtorou (2003) terbukti Komite audit independen berdampak negatif terhadap manajemen laba. lebih Semakin tinggi proporsi anggota independen, semakin kecil manajemen laba Diselesaikan oleh perusahaan

Dari beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

(Kouki et al., 2011) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan bisa meningkatkan kualitas dari proses pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan ketika manajer juga memiliki porsi kepemilikan, maka mereka akan bertindak sama seperti pemegang saham umumnya dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan mengungkapkan kondisi riil perusahaan. (Yang et al, 2008) yang menyebutkan praktik manajemen laba di perusahaan cenderung akan mengalami penurunan seiring dengan peningkatan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan (Agustia, 2013). (Fidyati, 2004) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi prosedur buat

mengurangi perkara keagenan & moral hazard berdasarkan manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Selain itu (Fidyati, 2004) mengungkapkan Menguji efek mekanisme corporate governance terhadap manajemen keuntungan dalam perusahaan Seasoned Equity Offering. Peneliti menghipotesakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pemegang saham publik dan reputasi auditor terhadap manajemen keuntungan. Dari keempat hipotesis yang diajukan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terbukti signifikan mensugesti manajemen keuntungan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Guna dan Herawaty (2010) dan Pradipta (2011) yang juga menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak bisa membatasi terjadinya manajemen laba (Agustia, 2013)

Dari beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Menurut (Sari, 2014) kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional diukur dari presentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan monitoring terhadap

perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat tercipta manajemen laba yang baik.

Dari beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

5. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Manajemen Laba

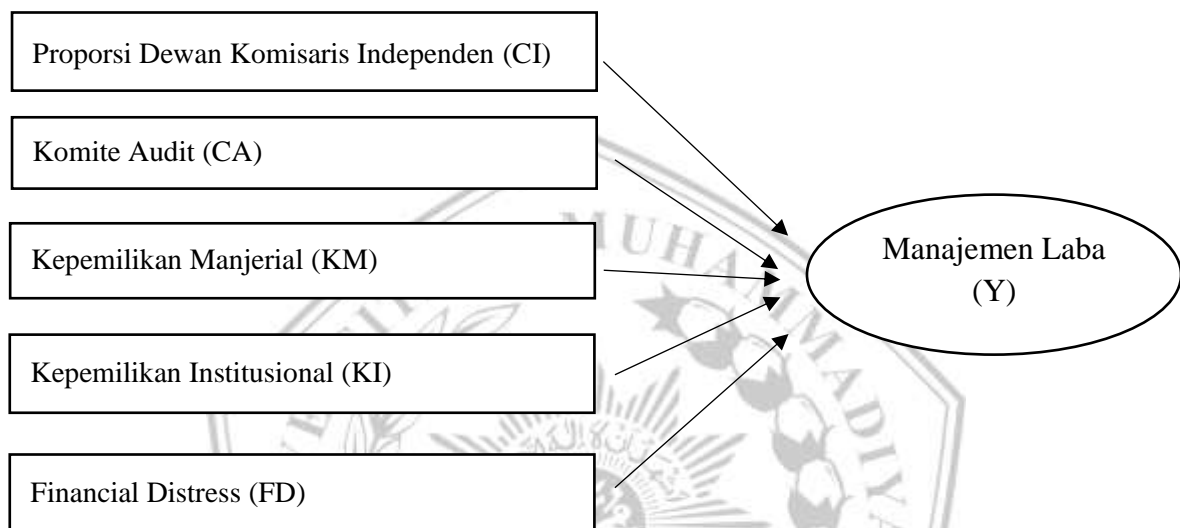
Menurut DWI A (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pentingnya memberi informasi pada investor mengenai kinerja perusahaan sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja baik. Pengaruh positif dari terjadinya financial distress terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan mengalami kendala pendanaan (financial distress) maka manajer cenderung untuk melakukan manajemen laba agar tetap memberikan signal yang baik dengan menampilkan kinerja laba jangka pendek yang selalu meningkat meskipun pada kenyataannya kondisi perusahaan sedang bermasalah. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan maka akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba (Ariati dan Suranta, 2012).

Financial distress merupakan keadaan yang dialami perusahaan saat perjanjian yang dilakukan pada perusahaan dan kreditur tanpa berjalan misalnya yang diharapkan, lantaran perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (Md. Zeni and Ameer, 2010). Financial distress dimulai dari ketidakmampuan perusahaan pada memenuhi kewajiban-kewajibannya, sebagai akibatnya manajer akan dipercaya tanpa mampu mengelola perusahaan dengan baik para pemegang saham. Hal tersebut akan memotivasi manajer melakukan manajemen laba menjadi bentuk untuk menutupi kinerjanya yang buruk. Oleh sebab itu, semakin tinggi taraf financial distress yang dialami suatu perusahaan, maka akan mendorong manajer buat melakukan manajemen

laba. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Achmad (2017) menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, buat menutupi kinerjanya mengenai syarat perusahaan yang buruk pada pemegang saham, manajer akan cenderung melakukan manajemen laba

H₅ : Financial Distress berpengaruh terhadap manajemen laba

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran